

## Upaya Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanggulangan Gelandangan & Pengemis Sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Pusat Kota Medan

Repaldo Siburian<sup>1</sup>, Husni Thamrin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sumatera Utara

### ARTICLE INFO

#### Article history:

##### Article history:

Received July 09, 2024

Revised July 15, 2024

Accepted July 25, 2024

Available online 2 August, 2024

#### Kata Kunci:

Penanggulangan, Gelandangan, Pengemis, Dinas Sosial

#### Keywords:

Countermeasures, Homelessness, Beggars, Social Service



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Gelandangan dan pengemis adalah seseorang ataupun kelompok yang tidak memiliki kehidupan sejahtera yang kehidupannya berada dibawah garis kemiskinan dan kehidupannya berada dijalanan serta termasuk kedalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Faktor penyebab adanya gelandangan dan pengemis ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal muncul dari sifat dan sikap dari diri seseorang seperti malas bekerja, merantu dengan modal nekat, memiliki cacat fisik dan iku-ikutan saja. Faktor internal ialah yang berasal dari luar diri seseorang seperti kurangnya akses lapangan kerja dan kurangnya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Upaya Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanggulangan Gelandangan & Pengemis Sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Pusat Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder dengan cara mengumpulkan dokumentasi seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanggulangan Gelandangan & Pengemis Sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Pusat Kota Medan melalui program rehabilitasi belum

optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya faktor penghambat seperti kurangnya prasaranan dan saran dalam mendukung rehabilitasi para gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh dinas sosial kota medan.

### ABSTRACT

*Homeless and beggars are a person or group who does not have a prosperous life whose life is below the poverty line and whose life is on the streets and is included in the Social Welfare Services Providers (SWSP). Factors causing the existence of vagrants and beggars are external and internal factors. External factors arise from the nature and attitude of a person such as being lazy to work, helping with reckless capital, having a physical disability and just following along. Internal factors are those that come from outside a person such as lack of access to employment and the lack of government in overcoming poverty. This research aims to describe and analyze The Medan City Social Service's Efforts In Overcoming Homelessness & Beggars As Social Welfare Service Providers (SWSP) In Medan City Center. This type of research is descriptive qualitative with the data sources used are primary data sources by means of observation and interviews. While secondary data by collecting documentation such as books and journals. The results of this study indicate that The Medan City Social Service's Efforts In Overcoming Homlessness And Beggars As Social Welfare Service Providers (SWSP) In Medan City Center through rehabilitation programs are not optimal. This is evidenced by the existence of inhibiting factors such as the lack of infrastructure and suggestions in supporting the rehabilitation of vagrants and beggars carried out by the Medan City Social Service.*

### PENDAHULUAN

Menurut Ashraf (2021) Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Penanggulangan dilakukan kepada orang yang memiliki masalah sosial baik secara individu maupun kelompok, biasanya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang turut serta dalam membantu tugas pemerintah tersebut. Salah satu contoh masalah sosial dalam melakukan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu gelandangan dan pengemis.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [repaaldoo@email.com](mailto:repaaldoo@email.com)

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi pusat perhatian oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera dilakukan penanggulangan ataupun penertiban. Menurut soetomo (2008) masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Gelandangan dan pengemis merupakan masalah fenomena sosial yang tidak hanya menjadi pusat perhatian oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melainkan kehadiran gelandangan dan pengemis menjadi pusat perhatian oleh masyarakat. Adanya kehadiran gelandangan dan pengemis tidak dapat diterima oleh sebagian masyarakat, karena kehidupan ke 2 PPKS tersebut memiliki tantangan hidup yang membedakan dengan kehidupan masyarakat normal lainnya. fenomena masalah sosial dengan kehadiran gelandangan dan pengemis selalu menjadi permasalahan sosial bagi daerah kota-kota besar.

Kota merupakan suatu wilayah yang pemukimannya relatif besar, padat dan permanen, serta dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Persaingan hidup yang keras di kota-kota besar membuat mereka yang tidak memiliki keterampilan, pengetahuan, wawasan ataupun tingkat pendidikan yang tinggi akan kehilangan peluang untuk mendapatkan mata pencaharian dalam penghidupan prekonomian mereka sebagaimana mestinya. Wilayah di pusat kota tidak terlepas dengan kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kehidupannya.

Menurut Thamrin, Masril & Sembiring (2017) berpendapat bahwa seseorang atau kelompok menjadi gelandangan dan pengemis terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah 1. Pendapatan sebagai pengemis yang lebih tinggi dibandingkan dengan profesi lain; 2. Budaya 'kehilangan muka' yang sudah luntur, sehingga masyarakat berani menjadi gelandangan dan menjadi pengemis; 3. Pilihan untuk menjadi pengemis. menjadi pengemis yang lebih nyaman untuk dilakukan. Sedangkan Faktor eksternalnya adalah: 1. Ekonomi; 2. Bujukan orang lain, 3. Ketidakpedulian lingkungan sekitar jika ada warga yang menjadi gelandangan atau pengemis. Ketidakpedulian keluarga jika ada anggota keluarga yang menjadi gelandangan atau pengemis.

Gelandangan dan pengemis tidak memiliki hidup yang sejahtera dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi gelandangan, pengemis dan juga masyarakat yang resah terhadap kehadiran ke 2 PPKS tersebut. Dinas sosial Kota Medan melakukan penanggulangan terhadap gelandangan dan pengemis di daerah pusat kota.

Dinas sosial Kota Medan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Medan terkhususnya di daerah pusat Kota Medan, hal ini menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan pada pasal 2 ayat 1 bahwa dilarang melakukan penggelandangan dan pengemis berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi atau menimbulkan belas kasihan pada orang lain. Pemerintah daerah Kota Medan memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan penanggulangan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terkhusus kepada gelandangan dan pengemis.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan kerja sama dalam penanggulanagn gelandangan dan pengemis sesuai dengan peraturan UndangUndang No 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Dinas sosial Kota Medan bekerjasama dengan satuan polisi pamong praja dalam melakukan penanggulangan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Medan terkhusus di daerah pusa kota. Adapun rekapitulasi data gelandangan dan pengemis yang sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) mulai thun 2018- 2022, sebagai berikut:

**Tabel 1.** Jumlah Gelandangan & Pengemis 2018-2022

No	Tahun	Laki-Laki	Prempuan	Jumlah
1	2018	170	106	276
2	2019	157	85	242
3	2020	239	133	372
4	2021	276	138	414
5	2022	151	98	249
	<b>Jumlah</b>	<b>993</b>	<b>560</b>	<b>1.553</b>

Gelandangan dan pengemis dapat dikatakan sebagai penyakit masyarakat (patologi sosial). Kartono (2003:1) menyatakan bahwa semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan,

stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Sedangkan menurut Soedjono (1973) pathologi sosial merupakan suatu gambaran tentang kondisi masyarakat dalam keadaan sakit dan atau abnormal yang ditandai dengan gejala-gejala sosial seperti gelandangan, prostitudi dan sejenisnya yang merupakan permasalahan sosial yang selalu ada di kota-kota besar sejak zaman dahulu hingga kini.

Kehadiran gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang memiliki pusat perhatian pada pemerintah daerah. Dengan demikian dinas sosial Kota Medan harus segera melakukan razia patroli untuk menanggulangi dan memberi pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis. Pemerintah daerah seperti dinas sosial Kota Medan harus melakukan upaya dalam mengurangi terhadap meningkatnya populasi gelandangan dan pengemis. Penanganan gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan bersama-sama dengan pihak terkait secara lintas fungsi maupun lintas sektoral sesuai peraturan perundangundangan.

Pengawasan terhadap penanganan masalah gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terprogram, terpadu, dan berkesinambungan. Salah satu langkah penanggulangan yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Medan dalam mengurangi angka populasi terhadap gelandangan dan pengemis adalah dengan melakukan rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Menurut Sri Yuni (Prasetyo & Dewi : 2019) bahwa Rehabilitasi sosial yaitu suatu rangkaian kegiatan profesional yang bertujuan memecahkan masalah, menumbuhkan, memulihkan dan meningkatkan kondisi fisik, mental dan sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Maka dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi sosial adalah bentuk upaya yang diberikan kepada klien dalam membantu untuk mencari jalan keluar dari masala-masalah sosial terhadap klien agar memiliki keberfungsian sosial dengan baik dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya.

## **METODE**

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan sesuai dengan bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu (Raco, 2010). Maka dari itu, Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikaji bahwa penelitian ini mengguakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefenisikan metode kualitatif merupakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan dari orang-orang, prilaku ataupun suatu objek yang dapat diamati (Mamik, 2015:3).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2013 : 224). Adapun sumber data dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu data primer dan data skunder.

### **Data Primer**

Informasi dari sumber data primer dalam penelitian kualitatif pada umumnya dapat digali lebih mendalam melalui teknik observasi dan teknik wawancara (Nugrahani, 2014:62).

#### **a. Observasi**

Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti apabila hal itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian. Dengan dilakukannya observasi ini, maka peneliti mendapatkan data yang lebih lengkap dan dapat mengetahui pada setiap tingkatan dari setiap prilaku yang diamati.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan proses komunikasi atau sebuah interaksi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang dapat memberikan data-data yang lengkap melalui proses wawancara. Dalam teknik wawancara, peneliti telah memiliki pertanyaan terstruktur untuk diajukan kepada sumber data atau subjek yang diteliti.

### **Data Skunder**

Data sekunder ialah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, penelitian biasanya mendapatkan sumber data melalui dokumen seperti dari buku, jurnal, surat kabar, foto, video dan lain sebagainya. Data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui sumber data sekunder melalui dokumentasi dengan berbagai alternatif wujudnya (Nugrahani, 2014:62).

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor dinas sosial kota medan yang beralamat di Jl. Pinang Baris, Kampung Lalalng, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20217 (belakang terminal pinang baris). Alasan peneliti melakukan penelitian di dinas sosial kota medan yaitu untuk melihat upaya dinas sosial kota medan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di pusat kota medan. karena, gelandangan dan pengemis dapat mengganggu kenyamanan

warga yang berkunjung di pusat kota dan dapat merusak fasilitas daerah pusat kota akibat dari ulah gelandangan dan pengemis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melihat keadaan dilapangan melalui observasi. Observasi ini dilakukan melalui wawancara. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan, mendengar, mencatat serta merekam dan memfoto kegiatan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti tidak hanya melakukan observasi di kantor dinas sosial kota medan, akan tetapi ikut serta dalam kegiatan turun lapangan dalam razia gelandangan dan pengemis di kota medan terkhususnya di pusat kota medan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh bidang rehabilitasi dinas sosial kota medan. Observasi ini tidak dilakukan hanya di kantor dinas sosial kota medan, akan tetapi penelitian ini dilakukan juga pada lingkungan masyarakat.



**Gambar 1. Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Kota Medan**

Peneliti melakukan penelitian pada lingkungan masyarakat untuk melakukan sesi wawancara terkait dengan kehadiran gelandangan dan pengemis yang ada di pusat kota medan dan melihat tanggapan salah satu masyarakat terkait keoptimalan, saran dan lain sebagainya terkait upaya dinas sosial kota medan dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis. Peneliti mengambil salah satu masyarakat yang tinggal di kota medan yang sebagai status mahasiswa.

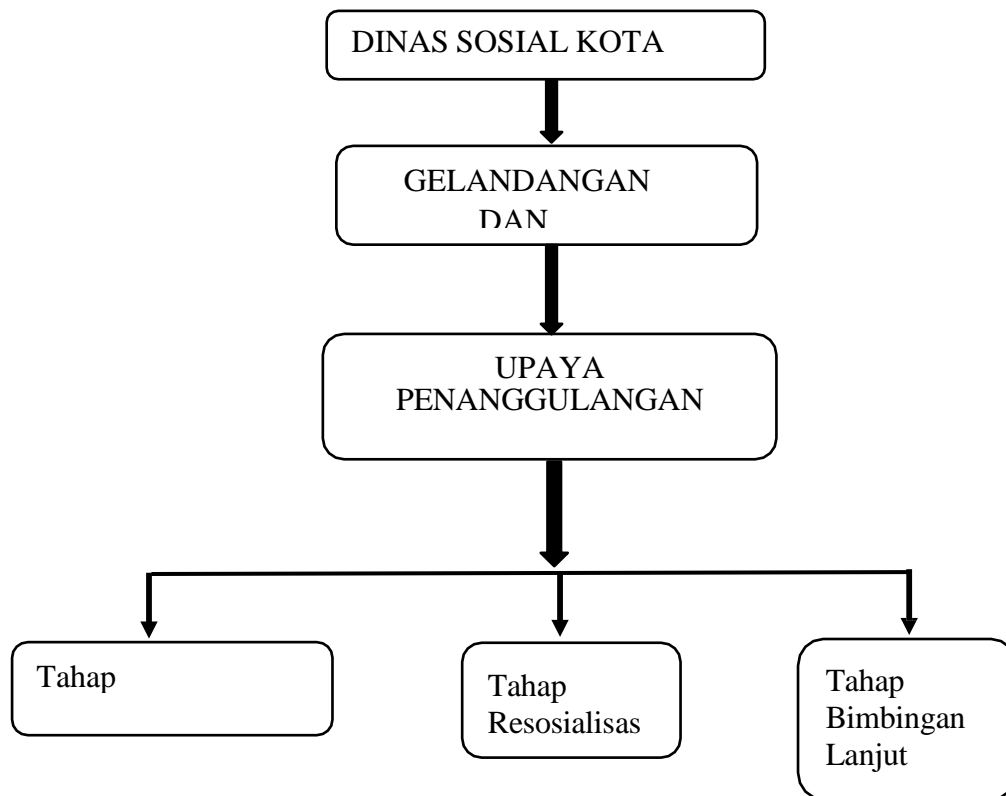
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti, bahwa upaya dinas sosial kota medan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di pusat kota medan adalah menjalankan program rehabilitasi sosial. Menurut BBRISBG Kartini Temanggung (Prasetyo & Dewi : 2019) bahwa Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Sri Yuni (Prasetyo & Dewi : 2019) bahwa Rehabilitasi sosial yaitu suatu rangkaian kegiatan profesional yang bertujuan memecahkan masalah, menumbuhkan, memulihkan dan meningkatkan kondisi fisik, mental dan sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Maka dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi sosial adalah bentuk upaya yang diberikan kepada klien dalam membantu untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah sosial terhadap klien agar memiliki keberfungsian sosial dengan baik dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya.



**Gambar 2. Wawancara dengan Pengemis**

Pada peneliti ini, peneliti berfokus pada upaya dinas sosial kota medan dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di pusat kota medan adalah menjalankan program rehabilitasi sosial. Dalam teori tahapan rehabilitasi sosial menurut Munawir Yusuf (1996:148-149) ada 3 tahapan rehabilitasi sosial yaitu: Tahap Rehabilitasi, Tahap Resosialisasi dan

Tahap Pembinaan Lanjut.



**Gambar 3. Kerangka Berfikir**

#### **Tahap Rehabilitasi**

Menurut Nurdin Widodo (Prasetyo & Dewi : 2019) rehabilitasi adalah segala tindakan fisik, penyesuaian psikologis dan penyesuaian diri secara maksimal untuk mempersiapkan klien secara fisik, mental, sosial dan vokasional bagi kehidupan sesuai dengan kemampuan. Dimana pada prosesnya diarahkan untuk: 1) Mencapai perbaikan penyesuaian klien sebesar-besarnya, 2) Kesempatan vokasional sehingga dapat bekerja dengan kapasitas maksimal, 3) Penyesuaian diri dalam lingkungan perorangan dan sosial secara memuaskan sehingga dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat. Tahap rehabilitasi memiliki beberapa sub bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **Tahap Pendekatan Awal**

Berdasarkan Standard Pelayanan Minimal (2007), bahwa pendekatan awal merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan atau dukungan dari pihak-pihak terkait. Selain itu, pendekatan awal meliputi proses pencarian calon klien (rekrutmen), seleksi dan motivasi. Proses pengambilan dan seleksi tersebut penting karena kualitas sumber manusia tergantung pada kualitas pengambilan dan seleksi. Seperti yang dilakukan oleh dinas sosial kota medan bahwa ada tahapan untuk menangkap dan memasukkan gelandangan dan pengemis kerumah singgah bahkan dikirim ke panti milik dinas sosial provinsi sumatera utara, ada yang dinamakan proses razia atau penertiban, pengenalan program rehabilitasi, menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti satpol pp, orientasi dan juga seleksi dari gelandangan dan pengemis yang berhasil ditangkap.

#### **Tahap Penerimaan**

Berdasarkan Standard Pelayanan Minimal (Prasetyo & Dewi : 2019) menjelaskan mengenai penerimaan dalam rehabilitasi sosial yang merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dalam program layanan rehabilitasi. Penerimaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Registrasi, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk administrasi dan mengisi data klien. Penempatan dalam program rehabilitasi sosial adalah kegiatan penempatan klien dalam program bimbingan keterampilan kerja klien berdasarkan pengelompokan data tentang minat dan bakat klien. Tahap registrasi dan penempatan gelandangan dan pengemis dilakukan oleh dinas sosial kota medan untuk mengirimkan para gelandangan dan pengemis ke panti milik dari dinas sosial provinsi sumatera utara.

Pengiriman ke panti dan penempatan dalam program rehabilitasi dilakukan karena sesuai kesepakatan antar dinas sosial kota medan dengan gelandangan dan pengemis apabila tertangkap untuk kedua kalinya. Selain itu dari kesepakatan antara dinas sosial kota medan, dinas sosial kota medan melakukan registrasi dan menempatkan gelandangan dan pengemis ke panti milik dari dinas sosial

provinsi Sumatera Utara apabila mereka tidak memiliki keluarga, maka dari itu dinas sosial Kota Medan mengirimkan gelandangan dan pengemis ke panti milik dari dinas sosial Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan rehabilitasi.

### **Tahap Bimbingan Sosial**

Bimbingan Sosial atau social guidance menurut Djumhur dan Surya (Yuhanita, 2017) merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam menyelesaikan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa dinas sosial Kota Medan tidak melakukan bimbingan sosial seperti meningkatkan ketrampilan kerja kepada gelandangan dan pengemis secara signifikan, hal ini dikarenakan bahwa dinas sosial Kota Medan belum memiliki prasarana yang mendukung untuk dilakukan pembinaan, bimbingan dan meningkatkan keterampilan pada gelandangan dan pengemis secara signifikan.

### **Tahap Resosialisasi**

Tahap Resosialisasi Tahap resosialisasi merupakan tahap yang dilakukan ketika warga binaan sosial tidak dapat menerima rehabilitasi sosial ke tahap selanjutnya. Resosialisasi ini adalah mengembalikan gelandangan dan pengemis ke wilayah asal mereka. Hal ini bermaksud untuk mengembalikan hak mereka untuk bersosialisasi dan beradaptasi kembali dengan lingkungan asal mereka. Menurut Munawir Yusuf (1996) tahap resosialisasi ini merupakan bimbingan kesiapan baik pihak klien maupun keluarga/masyarakat lingkungan klien. Tahap resosialisasi ini bertujuan untuk melatih kemampuan penyesuaian diri dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini menyatakan bahwa ada suatu tindakan sosialisasi terhadap pemulang gelandangan dan pengemis, sosialisasi ini tidak hanya dilakukan kepada gelandangan dan pengemis, tetapi sosialisasi ini dilakukan kepada keluarga gelandangan dan pengemis dan kepala lingkungan sebagai saksi pemulangan gelandangan dan pengemis.

Paul B. Horton (Hamda N, 2017) Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya. Sosialisasi ini dilakukan untuk membantu gelandangan dan pengemis belajar untuk menyesuaikan diri mereka ditengah-tengah masyarakat dan mereka dapat berperan dan berguna ditengah masyarakat Akan tetapi, pemulangan dan gelandangan dan pengemis tidak hanya dilakukan sosialisasi tetapi juga dilakukan motivasi supaya lebih semangat menjalankan hidup yang lebih bermanfaat dan tidak lagi hidup dijalan sebagai gelandangan dan pengemis.

### **Tahap Pembinaan Lanjut**

Menurut Munawir Yusuf (1996) di dalam tahap pembinaan lanjut terdiri dari bantuan pengembangan usaha dan mengembangkan usaha secara individu maupun berkelompok serta bimbingan pemantapan atau peningkatan usaha, kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan dan mengembangkan usaha secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Hal tersebut sesuai dengan tahap pembinaan lanjut yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Medan. Seperti informan Kunci katakan bahwa ada tahap pembinaan lanjut yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Medan pembinaan lanjut ini berupa program bantuan sosial tunai. Untuk mendapatkan dari program bantuan tersebut, gelandangan dan pengemis yang sebagai warga Kota Medan telah terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang meliputi para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial).

Apabila data diri gelandangan dan pengemis tidak terdaftar di DTKS, maka mereka tidak dapat bantuan sosial tunai yang disalurkan dari bidang rehabilitasi sosial, dinas sosial Kota Medan. Bantuan yang diberikan oleh dinas sosial Kota Medan tidak hanya berupa bantuan sosial tunai, akan tetapi bantuan yang diberikan dinas sosial Kota Medan berupa bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), pemberian untuk mendapatkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan bantuan KIS (Kartu Indonesia Sehat) Bantuan ini hanya terkhusus untuk warga Kota Medan, sedangkan untuk gelandangan dan pengemis yang bukan status penduduknya bukan warga Kota Medan, tidak mendapatkan bantuan. Maka dari itu, gelandangan dan pengemis yang tidak berstatus kependudukan warga Kota Medan 98 akan dipulangkan oleh tim URC dan dikonformasi terlebih dahulu kepada dinas sosial asal daerah dari gelandangan dan pengemis.

## **SIMPULAN**

Penanggulangan terhadap gelandangan dan pengemis di pusat Kota Medan telah diupayakan oleh dinas sosial Kota Medan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanggulangan Gelandangan & Pengemis Sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Pusat Kota Medan dilakukan dengan program rehabilitasi sosial. Program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Medan untuk mengurangi angka gelandangan dan pengemis di pusat Kota Medan dan dapat mensejahterakan penduduk warga Kota Medan.

Akan tetapi, pada program Rehabilitasi dalam proses pembinaan, peningkatan keterampilan kerja belum optimal karena terdapat kendala dalam melakukan rehabilitasi para gelandangan dan pengemis. Kendala yang dialami dinas sosial kota medan dalam merehabilitasi gelandangan dan pengemis yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung melakukan program rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis. Sarana yang tidak dimiliki oleh dinas sosial kota medan dalam merehabilitasi gelandangan dan pengemis seperti tidak adanya mesin jahitan untuk melatih mereka menjahit.

Kemudian, prasarana yang tidak dimiliki oleh dinas sosial kota medan dalam merehabilitasi gelandangan dan pengemis seperti tidak adanya bangunan resmi seperti panti yang dimiliki oleh dinas sosial kota medan sehingga membuat para pegawai dinas sosial kota medan tidak dapat menampung para gelandangan dan pengemis dengan apabila ketangkap dengan jumlah banyak. Dinas sosial kota medan memiliki rumah singgah sementara yang dikontrak setahun dengan jumlah kapasitas yang terbatas yang dapat menampung 8 orang saja. sehingga dinas sosial kota medan melakukan pengeiriman ke panti milik dari dinas sosial provinsi Sumatera Utara.

## SARAN

1. Bagi Pemerintah : Pemerintah kota medan lebih cepat dalam proses membangun RPS (Rumah Perlindungan Sosial) sebagai prasarana dinas sosial kota medan. Dengan tidak adanya prasarana yang dimiliki dinas sosial kota medan merupakan hambatan dalam melakukan rehabilitasi sosial.
2. Bagi Dinas Sosial Kota Medan : Kinerja yang dimiliki oleh dinas sosial kota medan dalam proses kurang optimal. Karena memiliki kendala dalam pada prasarana yang tidak dimiliki oleh dinas sosial kota medan, sehingga dapat menghambat proses rehabilitasi para gelandangan dan pengemis.
3. Bagi Masyarakat : Peran masyarakat juga sangat penting untuk ikut serta dalam menanggulangi kehadiran gelandangan dan pengemis. Masyarakat dapat melaporkan kepada ketua lingkungan apabila ada gelandangan dan pengemis muncul ditengah masyarakat sekitar.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Saya Repaldo Siburian merupakan Alumni Univeristas Sumatera Utara Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial mengucapkan trima kasih kepada dosen pembimbing saya Bapak Husni Thamrin S.Sos., MSP yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas penelitian saya dan juga kepada Ibu Mia Aulina Lubis S.Sos., M.Kesos dan Randa Putra Kasea Sinaga S.Sos., M.Kesos selaku dosen penguji saya yang telah memberi kritikan dan saran membangun dalam menyelesaikan tugas penelitian saya. Kepada orangtua saya yang telah menyemangati saya dan juga kepada seluruh staf pegawai dinas sosial kota medan yang telah membantu saya dalam melakukan pengumpulan data selama penelitian saya berlangsung.

## REFERENSI

- Ashraf, F. F. (2021). Peran Global Maritime Distress And Safety System (Gmdss) Dalam Upaya Penanggulangan Keadaan Marabahaya Dan Tindakan Penyelamatan Jiwa Dilaut Oleh Kn. Sar Sadewa 231 Pada Badan Sar Nasional (Basarnas) Semarang. Karya Tulis.
- Hamda, N. (2017). Masyarakat dan Sosialisasi. ITTIHAD, 12(22), 107-115.
- Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif. Surabaya: Zifatama Publisher.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Cakra Books, 1(1), 3-4.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan.
- Prasetyo, Y., & Dewi, U. (2019). Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras Yogyakarta. Journal of Public Policy and Administration Research, 4(2).
- Soedjono. (1973). Patologi Sosial Gelandangan Penyalah Gunaan Narkotika. Bandung.
- Soetomo. (2008). Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: Alfabeta.
- Thamrin, H., Masril, M., & Sembiring, W. M. (2016, November). Model of Social Service in Empowerment Welfare Issue in Medan. In 1st International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2016) (pp. 312-320). Atlantis Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Yuhanita, N. N. (2015). Bimbingan Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Berinteraksi Dengan Teman Sebaya. Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE), 1(1).